



INFLASI



Edisi XXVIII

LP EFD

Laporan Perkembangan
Ekonomi dan Fiskal Daerah



EXECUTIVE SUMMARY

- **Secara** umum kondisi aktivitas ekonomi di daerah pada periode 17 April-29 Mei 2022 diindikasikan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tren peningkatan mobilitas kecuali pada pusat transportasi umum sebagai akibat penurunan pasca mudik Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan, tren mobilitas taman terbuka masih ramai ditambah adanya pengumuman Presiden bahwa telah diperbolehkan tidak memakai masker di ruang terbuka.
- **Adapun,** pada bulan Mei 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,4 % karena meningkatnya harga indeks kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain terjadi penurunan NTP secara nasional sebesar 2,81%. Penurunan ini terjadi di 29 provinsi.
- **Kinerja Fiskal Daerah** dari segi APBD secara kumulatif, realisasi pendapatan daerah pada Mei 2022 mengalami penurunan 24,4% YoY. Transfer Ke Daerah (TKD) memberikan pengaruh penurunan pendapatan yang paling signifikan yakni 9,6% YoY. Hal ini utamanya disebabkan pada tahun 2021 terdapat kebijakan percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2020. Sementara itu, kontraksi kinerja realisasi PAD juga memberikan sumbangan penurunan pendapatan daerah sebesar 3.5% YoY. Pada sisi belanja, terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 19,4% dan kontraksi hampir merata terjadi di seluruh wilayah. Adapun penurunan belanja pegawai memberikan sumbangan tertinggi pada penurunan belanja daerah YoY.
- **Kinerja Daerah** yang menjadi fokus pada edisi kali ini adalah terkait pengendalian inflasi. Inflasi secara signifikan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi di tingkat Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).
- **Inovasi Daerah** yang menjadi topik pada edisi kali ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemantauan Inflasi Daerah Kota Magelang. Sementara Kabar Daerah yang diulas adalah mengenai terjadinya inflasi yang melanda banyak daerah di Indonesia.
- **Pada tajuk Editorial,** dijabarkan mengenai konsepsi pengendalian inflasi dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang saling terkoordinasi.
- **Kajian Pilihan** membahas mengenai hubungan infrastruktur daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi di daerah. Salah satu kesimpulan yang diambil dari kajian ini adalah daerah yang infrastrukturnya sudah baik cenderung memiliki tingkat IKK yang lebih rendah dan sebaliknya.




ISI
DAFTAR

<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	02
DAFTAR ISI	03
KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH	04
KINERJA FISKAL DAERAH	05
KINERJA DAERAH	10
INOVASI DAERAH	15
KABAR DAERAH	16
EDITORIAL	18
KAJIAN PILIHAN	22



Kondisi Perekonomian Daerah

Berdasarkan *mobility index* pada periode 17 April – 29 Mei 2022, secara umum di seluruh wilayah Indonesia terdapat peningkatan aktivitas ekonomi kecuali pada pusat transportasi umum yang mengalami penurunan -4%. Hal ini diduga karena sebelumnya terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada tren mobilitas transportasi umum pada periode Hari Raya Idul Fitri sehingga pada periode setelahnya kembali ke *business as usual*. Adapun tren mobilitas taman terbuka masih ramai ditambah adanya pengumuman Presiden bahwa telah diperbolehkan tidak memakai masker di ruang terbuka. Lebih lanjut di tingkat regional, Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan aktivitas dengan tingkat *mobility index* retail dan rekreasi -13%, transportasi umum -39%, dan tempat kerja -8%. Pola yang sama juga terjadi di DKI Jakarta di tambah dengan penurunan tren di taman umum. Sedangkan di provinsi lain sebagian besar mengalami tren positif.

Sumber: *Community Mobility Reports, 2022*

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada April 2022 mencapai 111,06 ribu kunjungan, naik 499,01% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk utama pada April 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk utama pada April 2022 juga meningkat sebesar 172,27%. Dibukanya pintu mancanegara dan pelonggaran peraturan mobilitas masyarakat membuat sektor pariwisata kembali tumbuh.

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2022*

Highlight Indikator Bulanan

Kunjungan Wisman April 2022



499,01%

(terhadap April 2021)

Mobility Index Nasional*

Retail dan rekreasi



Toko bahan makanan



Tempat kerja



Pusat transportasi umum



Taman



Area pemukiman



*dibandingkan dengan *baseline* per 3 Jan- 6 Feb 2020 (sebelum COVID-19)

Kondisi Perekonomian Daerah

Pada bulan Mei 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,4 %. Inflasi pada Mei 2022 terjadi karena meningkatnya harga indeks kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,78% dengan andil inflasi sebesar 0,20%. Komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau berupa komoditas yang dibutuhkan saat hari raya Idul Fitri seperti telur ayam ras, bawang merah, dan daging sapi.

Kelompok pengeluaran transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,65% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Momen mudik di hari raya Idul Fitri turut meningkatkan inflasi subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 2,63%.

Dari 90 Kota IHK, 87 kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi berturut-turut terjadi di Kota Tanjung Pandan, Kota Pare-Pare, dan Kota Bukittinggi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari 34 provinsi, sebanyak 29 provinsi mengalami penurunan NTP, 5 provinsi lainnya mengalami peningkatan. Penurunan NTP tertinggi pada Mei 2022 terjadi di Provinsi Riau, yaitu sebesar 14,57%, sedangkan kenaikan NTP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1,02%. Turunnya NTP menunjukkan bahwa indeks harga yang dibayarkan petani untuk konsumsi dan memproduksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Nilai Tukar Petani Mei 2022

105,41

(turun 2,81% M-o-M)

Inflasi Mei 2022 (MoM)

Rp

Inflasi
0,4%

3 DAERAH INFLASI TERTINGGI

Kota Tanjung Pandan 2,24%

Kota Pare-Pare 1,88%

Kota Bukittinggi 1,55%

Kinerja Fiskal Daerah

Kinerja TKD

Penyaluran TKD s.d. 19 Mei 2022 secara nominal lebih rendah yaitu sebesar Rp 245,81 triliun, dibandingkan TA 2021 (YoY) yang sebesar Rp 270,99 triliun, serta secara tingkat penyaluran terhadap total alokasi TKD juga lebih rendah yaitu sebesar 31,9% dibandingkan TA 2021 sebesar 34,1%.

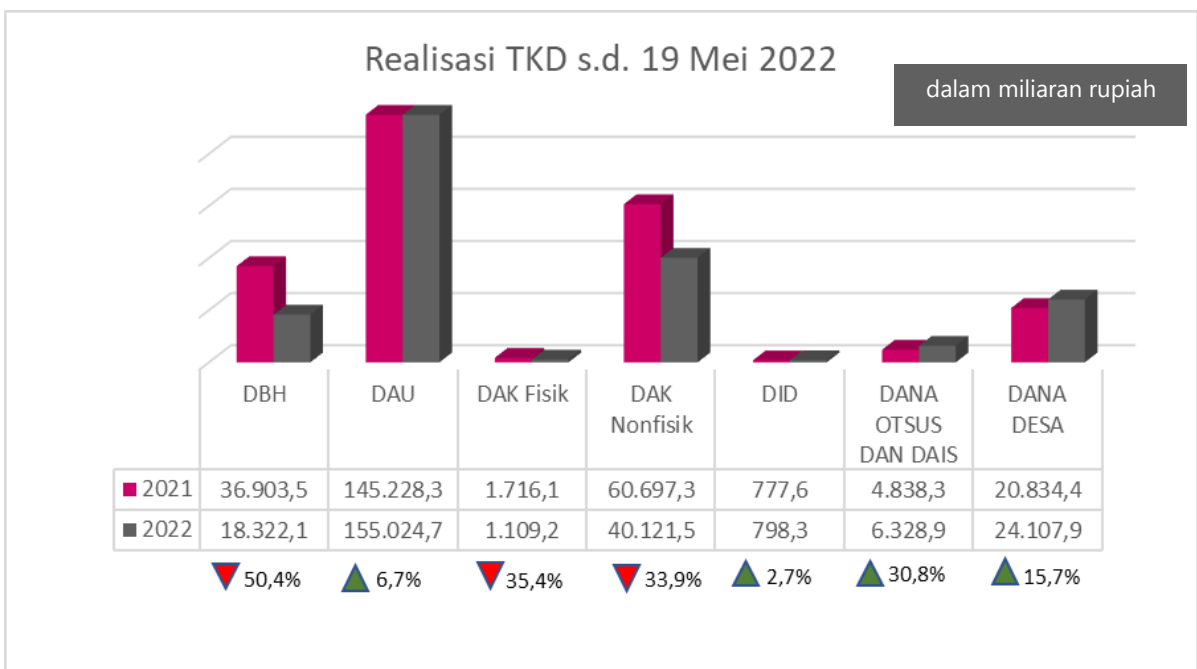
Kenaikan besaran nominal penyaluran TKD tertinggi hingga 19 Mei 2022 terjadi pada penyaluran pada Dana Otsus dan Dana Keistimewaan sebesar 30,8% dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan karena telah dilakukan penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap I sebesar 30% dari pagu alokasinya.

Penurunan nominal penyaluran TKD terbesar terdapat pada DBH (turun 50,4%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2020 sebesar Rp 9,9 triliun. Biasanya penyelesaian Kurang Bayar tahun sebelumnya dilakukan setelah hasil audit BPK. Namun pada pada bulan Maret tahun 2021, sebelum audit BPK, dilakukan penyaluran Kurang Bayar DBH

TA 2020 sementara dalam rangka percepatan penyaluran Kurang Bayar. Selain itu, pada bulan Februari tahun 2021 juga terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2019 sebesar Rp 6 triliun.

Sementara itu, penurunan nominal penyaluran DAK Fisik sebesar 35,4% disebabkan Pemda yang masih berproses dalam melengkapi syarat salur tahap I. Sedangkan penurunan nominal penyaluran DAK Nonfisik sebesar 33,9% disebabkan belum disalurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II karena belum adanya rekomendasi penyaluran dari Kemendikbud.

Sekitar 37,81% TKD TA 2022 atau sebesar Rp 290,98 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor Pendidikan. Realisasi TKD untuk sektor Pendidikan sampai dengan 19 Mei 2022 adalah sebesar 34,06% atau sebesar Rp 99,1 triliun yang bersumber dari DAU Rp 63 triliun, DAK Nonfisik Rp 34 triliun, Dana Otsus Rp 425 miliar, DAK Fisik Rp 187 miliar, dan DID Rp 204 miliar.



Kinerja Fiskal Daerah

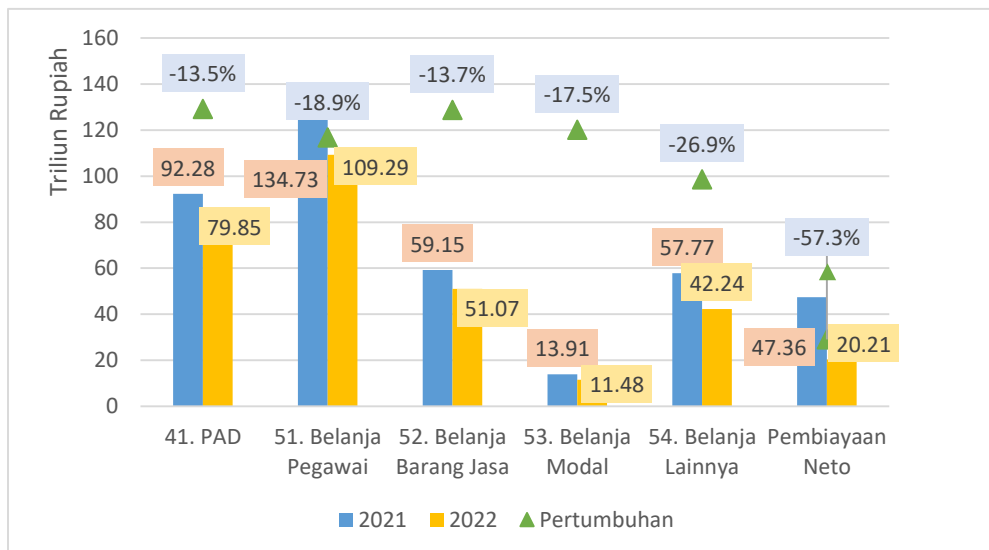
Sekitar 4,56% TKD TA 2022 atau sebesar Rp 35,1 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor Kesehatan. Realisasi TKD untuk sektor Pendidikan sampai dengan 19 Mei 2022 adalah sebesar 20,2% atau sebesar Rp 7,1 triliun, yang bersumber dari DAK Nonfisik Rp 5,1 triliun, Dana Desa Rp 1,2 triliun, DID Rp 336 miliar, Dana Otsus Rp 283 miliar, dan DAK Fisik Rp 86,3 miliar.

Jenis TKD yang dialokasikan untuk perlindungan sosial yaitu berupa BLT Desa. BLT Desa ditujukan untuk mendukung program Pemerintah untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk tahun 2022, BLT Desa dialokasikan sebesar Rp27,2 triliun

yang akan dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp300.000,- per bulan selama 12 bulan, yang penyalurannya dilaksanakan secara triwulanan. Sampai dengan 19 Mei 2022 BLT Desa telah disalurkan sebesar Rp 8,4 triliun atau 30,88% dari target.

Dukungan TKD untuk infrastruktur tahun 2022 mencapai Rp91,96 triliun atau 11,95% dari total alokasi TKD. Realisasi TKD untuk sektor Pendidikan sampai dengan 19 Mei 2022 adalah sebesar Rp 23,47 triliun (25,53%) yang berasal dari DTU sebesar Rp 21,8 triliun, DTI sebesar Rp 1,3 triliun, dan DAK Fisik sebesar Rp 420,3 miliar.

Kinerja APBD¹



Realisasi APBD s.d Mei 2022

Kinerja APBD pada Mei 2022 ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Secara kumulatif, realisasi pendapatan daerah pada Mei ini mengalami penurunan 24,4% dari Rp354,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi hanya Rp268,05 triliun. Transfer Ke Daerah (TKD) memberikan pengaruh

penurunan pendapatan yang paling signifikan. Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, penyaluran TKD mengalami penurunan 9,6% year on year. Sementara itu, kinerja daerah dalam mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga mengalami penurunan.

¹Data yang digunakan merupakan realisasi APBD periode Mei 2022 per 3 Juni 2022 yang terkumpul sebanyak 498 daerah

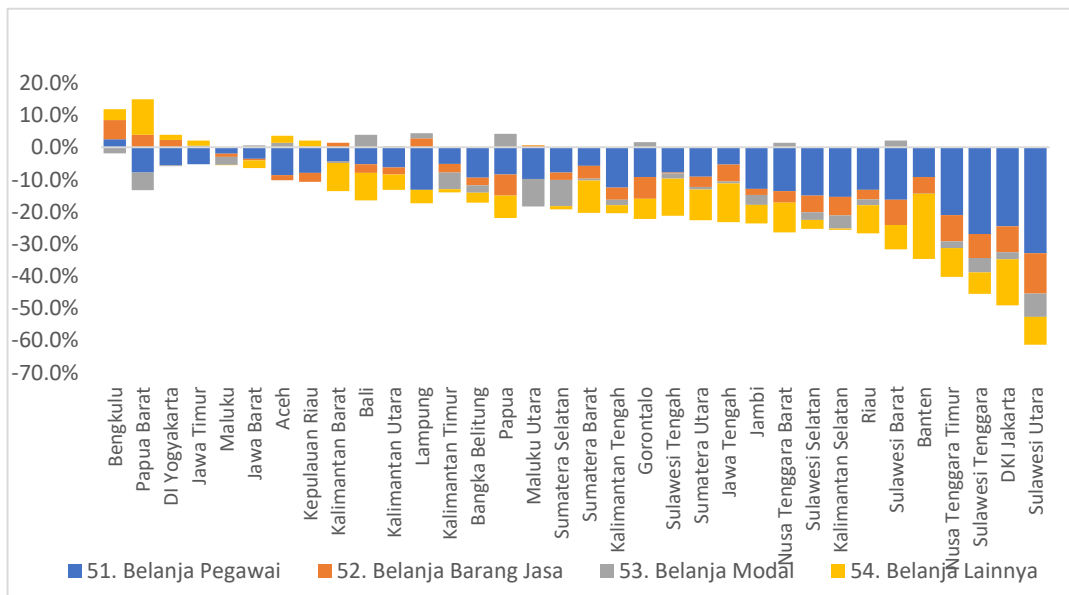
Kinerja Fiskal Daerah

PAD memberikan sumbangan penurunan pendapatan daerah sebesar 3,5%. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan Lain – lain PAD yang sah dan pajak daerah.

Penurunan pendapatan juga diikuti dengan penurunan belanja hingga 19,4%. Realisasi belanja pada Mei ini hanya sebesar Rp171,84 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp265,56 triliun. Komponen belanja lainnya mengalami pertumbuhan negatif paling dalam hingga mencapai 26,9% yoy. Namun demikian, jika dihitung dari kontribusinya, belanja pegawai memberikan kontribusi yang paling tinggi pada penurunan belanja secara kumulatif karena proporsinya terhadap belanja yang paling besar. Faktor yang menyebabkan kontraksinya belanja pegawai karena menurunnya realisasi pembayaran gaji tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai (TPP). Adapun belanja pegawai berkontribusi pada kontraksi belanja daerah sebesar 9,6%. Selain itu, belanja lainnya juga memiliki kontribusi yang cukup besar hingga mencapai 5,8%. Utamanya karena menurunnya belanja hibah dimana pada tahun 2022 ini, dalam struktur APBD, alokasinya menurun

signifikan. Sementara itu, penurunan pada belanja barang jasa disumbangkan oleh kontraksi pada belanja jasa kantor sedangkan belanja modal berkontraksi karena melambatnya realisasi belanja modal konstruksi khususnya pembangunan jalan.

Kontraksi belanja daerah hampir merata terjadi di seluruh wilayah. Hanya wilayah Bengkulu dan Papua Barat yang mengalami pertumbuhan positif (*yoy*) belanja daerah hingga Mei 2022 ini. Sementara itu, dari 32 wilayah provinsi yang mengalami penurunan, terdapat 17 wilayah mengalami kontraksi diatas penurunan secara nasional. Jakarta dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap penurunan secara nasional. Dari sisi komponen belanja, hampir di seluruh wilayah, belanja pegawai memberikan sumbangan tertinggi pada penurunan belanja daerah *year on year*. Gaji tunjangan serta TPP yang menurun menjadi fenomena umum yang terjadi hampir di seluruh daerah.

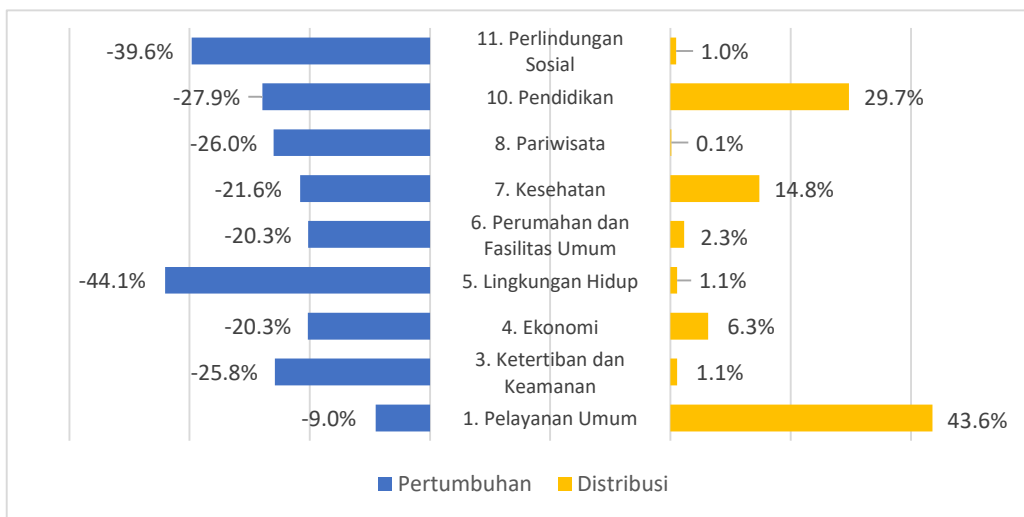


Sumber Pertumbuhan Belanja Daerah Menurut Wilayah²

² Wilayah merupakan agregasi dari realisasi APBD provinsi, kabupaten dan Kota dalam wilayah provinsi bersangkutan

Kinerja Fiskal Daerah

Berdasarkan klasifikasi fungsi, terlihat belanja daerah setiap fungsi mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Dari 9 fungsi dari APBD, 8 fungsi diantaranya mengalami kontraksi belanja melebihi kontraksi belanja daerah secara nasional yaitu diatas 20%. Jika dilihat dari distribusi per fungsinya, realisasi belanja hingga Mei tahun berjalan ini didominasi oleh fungsi–fungsi besar yaitu pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Proporsi ketiga fungsi tersebut bahkan mencapai 88,1% terhadap realisasi anggaran. Dengan demikian sekaligus mengaskan ketiga fungsi itulah yang berkontribusi pada kontraksi belanja daerah. Fungsi pendidikan memiliki kontribusi tertinggi terhadap kontraksi belanja daerah yaitu mencapai 9,3%. Sementara itu, fungsi pelayanan umum dan kesehatan masing – masing memiliki sumbangsih terhadap penurunan belanja daerah sebsar 3,5% dan 3,3%.



Pertumbuhan dan Distribusi Realisasi APBD s.d Mei 2022 Menurut Fungsi

Kinerja Daerah

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. IHK menurut kelompok pengeluaran pada bulan April 2022 sebesar 109,98, ini merupakan IHK Umum tertinggi sejak Januari 2020. IHK Umum setiap bulan terus mengalami peningkatan sejak Januari 2020 sebesar 104,33. Pada periode Januari 2020 – April 2022, IHK Umum mengalami beberapa kali penurunan di bulan Juli - September 2020, Juni dan September 2021 serta Februari 2022.

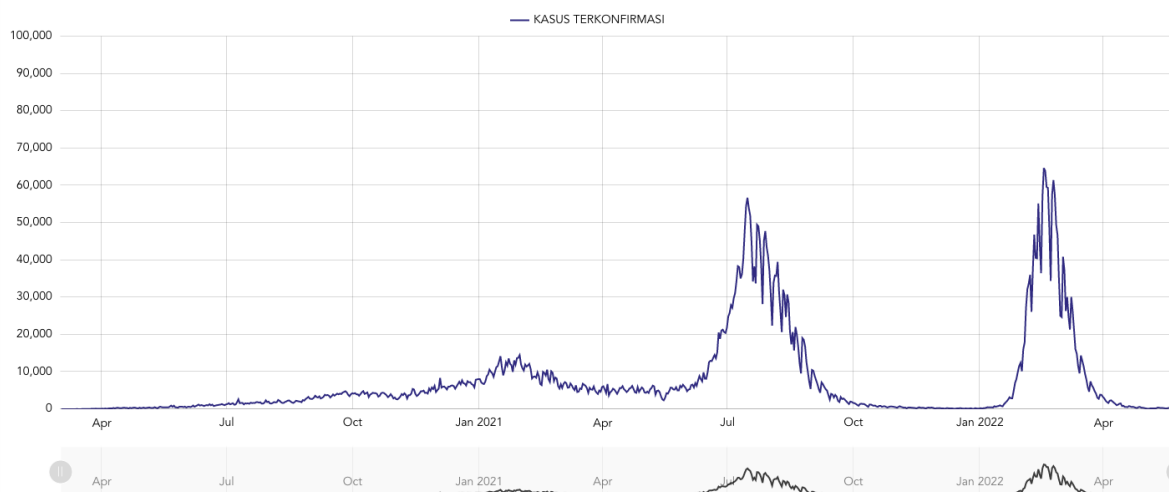


Sumber : BPS, diolah.

Penurunan IHK Umum tersebut terjadi sejalan dengan peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Periode Juli – September 2020 merupakan fase awal pandemi COVID-19 dimana pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Pada bulan Juli sampai dengan September 2021 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 yang disebabkan oleh penyebaran varian delta di Indonesia. Sedangkan penyebaran varian omicron menyebabkan peningkatan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 pada bulan Februari 2022.

Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari

NASIONAL



Sumber : covid19.go.id

Kinerja Daerah

IHK dan Inflasi Nasional merupakan gabungan dari IHK dan inflasi seluruh daerah. Salah satu komponen utama dalam perhitungan IHK ialah Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS di 90 kota yang terdiri atas 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, Kota Sintang mencatat IHK Umum tertinggi di seluruh kota pada bulan April 2022 sebesar 118,59, sedangkan IHK Umum terendah ialah Kota Cirebon sebesar 107,40. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,58% dan terendah terjadi di Gunung Sitoli sebesar 0,22%.

IHK pada April 2022 mengalami inflasi sebesar 0,95% (mtm). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari – April) 2022 sebesar 2,15% dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 3,47%.

Dari grafik perbandingan tingkat inflasi nasional dan kluster daerah periode bulan Januari sampai dengan April 2022, dapat diketahui bahwa pergerakan inflasi rata-rata pada setiap kluster wilayah relatif searah dengan pergerakan inflasi nasional, dengan kecenderungan inflasi pada wilayah Jawa secara rata-rata di atas inflasi nasional. Tingkat inflasi nasional pada bulan Januari 2022 sebesar 0,56% dimana tingkat inflasi rata-rata di wilayah Jawa sebesar 1,39% dan di wilayah Maluku-Papua sebesar 0,22%. Pada bulan Februari 2022 terjadi deflasi sebesar -0,02%. Terdapat 53 Kota yang mengalami deflasi dengan deflasi tertinggi dialami oleh Kota Tanjung Pandan sebesar -2,08% sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Palembang,

Tertinggi		Terendah	
Nama Daerah	IHK	Nama Daerah	IHK
SINTANG	118,59	CIREBON	107,40
MEULABOH	113,60	TANJUNG PINANG	107,47
KOTA BARU	113,46	MEDAN	107,91
TANJUNG PANDAN	113,46	BANYUWANGI	108,06
SERANG	113,32	TASIKMALAYA	108,34
LUWUK	113,31	TERNATE	108,37
SAMPIT	113,15	SORONG	108,43
PALU	112,86	JAYAPURA	108,46
CILEGON	112,69	TANJUNG SELOR	108,53
MANOKWARI	112,41	PROBOLINGGO	108,60

Tertinggi		Terendah	
Nama Daerah	Inflasi	Nama Daerah	Inflasi
TANJUNG PANDAN	2,58	GUNUNGSITOLI	0,22
JAYAPURA	2,38	SIBOLGA	0,38
PANGKAL PINANG	1,82	PEMATANG SIANTAR	0,39
KENDARI	1,80	MEDAN	0,43
TUAL	1,74	MAUMERE	0,54
CILACAP	1,68	TEMBILAHAN	0,55
PURWOKERTO	1,65	PEKANBARU	0,57
SINTANG	1,58	PADANG	0,60
MANADO	1,55	TANJUNG SELOR	0,60
JAMBI	1,53	BULUKUMBA	0,62

Sumber : BPS, diolah.

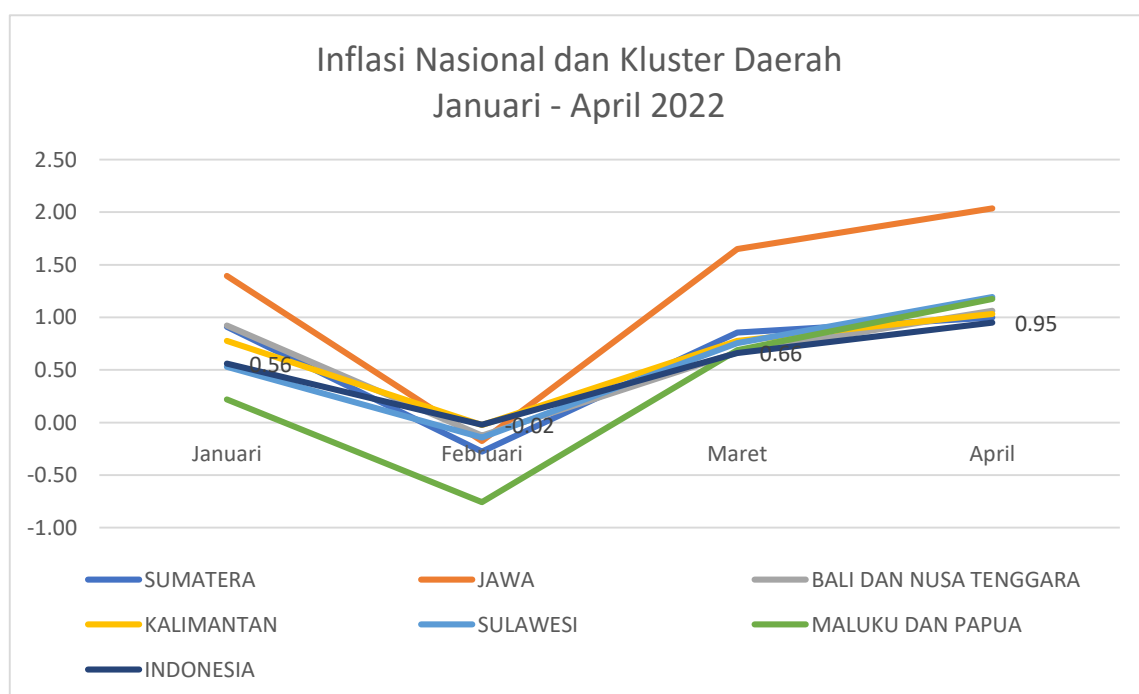
Kinerja Daerah

Kota Palangkaraya dan Kota Tarakan sebesar -0,01%. Di sisi lain, pada Februari 2022 terdapat 37 daerah yang mengalami inflasi, Kota Kupang dengan inflasi tertinggi sebesar 0,65% dan Kota Tanjung Selor dengan inflasi terendah sebesar 0,01%. Pada bulan Maret 2022, kembali terjadi inflasi baik secara nasional maupun pada seluruh kluster wilayah dengan tingkat inflasi secara nasional ialah 0,66%. Tingkat pertumbuhan inflasi rata-rata tertinggi ialah kluster Kalimantan, dari deflasi sebesar -0,02% pada bulan Februari menjadi inflasi sebesar 0,78% pada bulan Maret 2022. Tingkat inflasi secara nasional pada bulan April 2022 ialah sebesar 0,95%. Rata-rata seluruh kluster wilayah juga mengalami inflasi di atas 1% dengan tingkat inflasi tertinggi ialah pada kluster Jawa sebesar 2,04%. Peningkatan inflasi pada bulan April 2022 dipengaruhi oleh momen Ramadhan 1443H yang memicu peningkatan *demand* dari masyarakat serta peningkatan harga komoditas di level internasional.

Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi secara signifikan berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu seperti halnya di tingkat pusat yang mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro, daerah juga memperhatikan kondisi ekonomi makro pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD. Tidak hanya karena inflasi dapat berpengaruh pada perencanaan belanja dan penentuan target pendapatan, akan tetapi ia sangat berpengaruh pada masyarakat miskin mengingat banyak di antara kelompok komoditas inflasi adalah barang yang permintaannya inelastis seperti bahan makanan, makanan jadi, air, dan listrik.

Upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi dengan penentuan sasaran inflasi berikut perumusan strategi pengendalian inflasi di tingkat nasional melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan ditindaklanjuti di daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi



Sumber : BPS, diolah.

Kinerja Daerah

(TPID Provinsi) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (TPID Kab./Kota). Secara ringkas, pengendalian inflasi mencakup (i) keterjangkauan harga oleh masyarakat, (ii) ketersediaan pasokan komoditas, (iii) kelancaran distribusi, dan (iv) upaya membangun komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat.

Secara berjenjang TPID Kab./Kota dan TPID Provinsi melaporkan perkembangan inflasi daerah, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa berikut risiko ke depan kepada TPIP dengan dilengkapi identifikasi permasalahan pengendalian inflasi dan pelaksanaan, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. Untuk memberikan apresiasi

atas kinerja TPID diberikan penghargaan untuk TPID yang memiliki kinerja terbaik dan berprestasi menurut kawasan dan kategori provinsi/kabupaten/kota. Kriteria evaluasi kinerja yang digunakan adalah (i) realisasi dan volatilitas inflasi daerah, (ii) panduan pelaksanaan tugas TPID, (iii) kesesuaian kebijakan dengan arahan presiden dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, hasil rapat koordinasi pimpinan Kementerian/Lembaga serta rapat koordinasi pusat-daerah, (iv) kesesuaian kebijakan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, dan (v) pertimbangan kesinambungan program kerja TPID.

Penghargaan TPID	2019	2020	2021
Sumatera			
Provinsi			
Berkinerja Terbaik	Prov. Bengkulu	Prov. Sumatera Barat	Prov. Sumatera Utara
Kabupaten/Kota			
Berkinerja Terbaik	Kota Tanjung Pinang	Kab. Bungo	Kota Pekanbaru
Berprestasi	Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Datar
Jawa-Bali			
Provinsi			
Berkinerja Terbaik	Prov. DKI Jakarta	Prov. Jawa Tengah	Prov. D.I. Yogyakarta
Kabupaten/Kota			
Berkinerja Terbaik	Kota Kediri	Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi
Berprestasi	Kab. Badung	Kab. Badung	Kab. Blitar

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kinerja Daerah

Penghargaan TPID	2019	2020	2021
Kalimantan			
Provinsi			
Berkinerja Terbaik	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota			
Berkinerja Terbaik	Kota Samarinda	Kota Samarinda	Kota Samarinda
Berprestasi	Kab. Mahakam Ulu	Kab. Mahakam Ulu	Kab. Kutai Barat
Sulawesi			
Provinsi			
Berkinerja Terbaik	Prov. Gorontalo	Prov. Gorontalo	Prov. Gorontalo
Kabupaten/Kota			
Berkinerja Terbaik	Kota Palopo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo
Berprestasi	Kab. Pohuwato	Kab. Majene	Kab. Bone Bolango
Nusra-Maluku-Papua			
Provinsi			
Berkinerja Terbaik	Prov. Nusa Tenggara Barat	Prov. Papua	Prov. Papua
Kabupaten/Kota			
Berkinerja Terbaik	Kota Mataram	Kota Jayapura	Kota Jayapura
Berprestasi	Kab. Lombok Barat	Kab. Maluku Tenggara	Kab. Maluku Tenggara

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Inovasi Daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemantauan Inflasi Daerah “IndiGO Sebuah Inovasi Kota Magelang”

Pada era digitalisasi seperti saat ini, data merupakan sumber daya yang krusial dan fundamental khususnya dalam *evidence-based policy making*. Dengan pemahaman tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah mendapatkan apresiasi atas prestasinya dalam mengelola data sektoral melalui kelembagaan forum data yang solid dan keberadaan portal data terbuka yang berkualitas. Implementasi hal tersebut telah diwujudkan melalui portal DataGO (<https://datago.magelangkota.go.id/>) yang telah terintegrasi dengan portal Satu Data Jawa Tengah dan Satu Data Indonesia. Inovasi ini telah berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2019.

Dalam pengembangannya, portal DataGo juga dimanfaatkan dalam rangka pemantauan gejala harga secara berkala di Kota Magelang. Melalui aplikasi IndiGo (Pemantauan Inflasi Melalui DataGO), seluruh anggota oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendapatkan early warning dari hasil pemantauan harga di beberapa pasar besar di Kota Magelang, yaitu Pasar Kebon Polo, Pasar Rejowinangun, dan Pasar Gotong Royong. IndiGO merupakan modul yang terintegrasi antara DataGO dengan gawai/telepon genggam seluruh anggota TPID melalui aplikasi Telegram.

Kehadiran IndiGO bertujuan untuk menyajikan perkembangan data harga komoditas harian secara *real-time* yang terintegrasi dan mengirimkan *alert* atau notifikasi peringatan ke telepon genggam seluruh anggota TPID

jika terdapat komoditas dengan harga yang mendekati (85% dari batas koefisien variasi) dan atau melebihi batas koefisien variasi yang ditetapkan. Adapun komoditas yang dipantau sangatlah beragam dari komoditas pangan, sayur, dan buah-buahan, hingga barang strategis seperti kebutuhan konstruksi dan pertanian.

Dengan adanya data pergerakan harga-harga yang cepat dan akurat, akan memberikan TPID *insight* dan basis dalam menentukan tindakan antisipasi peningkatan inflasi di daerah Kota Magelang. Hal seperti ini tentunya perlu dicontoh oleh daerah lain dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dalam penyediaan data yang cepat dan akurat guna penyusunan kebijakan publik yang tepat.

Kabar Daerah

Pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota **Tanjungpinang** hari Jumat, 27 Mei 2022, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa inflasi kota Tanjungpinang pada bulan April sebesar 0,84%, di mana komoditi dominan penyumbang inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang kontribusinya 1,78%. Komoditi yang dominan memberikan inflasi adalah minyak goreng dengan andil 0,4436%, bayam andil 0,0827%, telur ayam ras andil 0,0719%, sawi hijau andil 0,0526%, tarif angkutan udara andil 0,0377%, rokok kretek filter andil 0,0494%, dan mobil andil 0,1445%. Berdasarkan inflasi 24 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera dan Nasional pada April 2022, Kota Tanjungpinang berada di posisi sebelas terendah inflasi yakni 0,84%, sementara Kota **Batam**, sepuluh tertinggi inflasi yakni sebesar 1,12%. Sedangkan secara nasional inflasi mencapai 0,95%. Hampir semua kota di Sumatera mengalami inflasi. Hal ini disebabkan karena sejumlah komoditi mengalami kenaikan sehubungan adanya perayaan hari raya besar keagamaan pada April dan awal Mei 2022.

.....
<https://www.tanjungpinangkota.go.id>
 (diunduh 28 Mei 2022)

Pada akhir Mei 2022, Kepala BPS Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa **Purwokerto** masuk dalam 90 kota di Indonesia yang dipantau angka inflasinya dan inflasi Purwokerto pada bulan April 2022 mencapai 1,665% sehingga menjadikan kota tersebut berada pada peringkat kedua nilai inflasi tertinggi di Jawa Tengah. Dari 11 kelompok pengeluaran, 7 diantaranya mengalami inflasi yaitu (makanan, minuman, tembakau, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, penyediaan makan minum restoran, peralatan pribadi jasa lainnya), 4 tidak inflasi yaitu (pakaian, alas kaki), informasi komunikasi dan jasa keuangan (tetap), rekreasi olahraga dan Pendidikan (tidak mengalami inflasi dan deflasi).

.....
<https://rri.co.id> (diunduh 28 Mei 2022)

Untuk menghindari gejolak harga yang mengakibatkan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) **Solo** menggelar pasar murah paket sembako menjelang Lebaran tahun 2022. Sebanyak 2.000 paket sembako dijual dengan harga terjangkau di Balai Kota Solo. Paket sembako tersebut berisi 2,5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng premium, dan 1 kg gula pasir yang harga normalnya sekitar Rp90 ribu dijual dengan harga Rp75 ribu. Menurut Wakil Ketua TPID Solo, sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Solo, pasar murah digelar untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tercukupi sehingga masyarakat tidak lagi *panic buying* atau menimbun bahan pangan. Saat Ramadan dan Lebaran memang terjadi peningkatan harga, tapi masih terkendali yaitu disekitar angka 1 persen. Selain melalui pasar murah, Walikota Solo juga memberikan bantuan pangan secara gratis berupa 10 ribu paket sembako dari Solo Bersama Selamanya dan berbagai elemen.

.....
<https://www.detik.com>
 (diunduh 26 Mei 2022)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Maluku Utara akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah **Maluku Utara** untuk mengendalikan inflasi bulan April 2022 agar kondisi kemiskinan bisa ditekan sehingga perekonomian bisa tumbuh. Langkah yang diambil tidak hanya pada sektor pertambangan semata, akan tetapi juga peningkatan peran sektor jasa dan UKM. KPBI juga memperkuat forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mendorong pertumbuhan kredit bekerja sama dengan OJK, serta mendorong peran UMKM dan digitalisasi.

.....
<https://www.antaranews.com>
 (diunduh 30 Mei 2022)

Kabar Daerah

Pada April 2022, inflasi Provinsi **Sumatera Utara** (Gabungan lima kota, yaitu Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli) sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,38. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, lima kota IHK di Sumatera Utara tersebut, seluruhnya tercatat inflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,38 persen; Pematangsiantar sebesar 0,39 persen; Medan sebesar 0,43 persen; Padangsidempuan sebesar 0,78 persen; dan Gunung Sitoli sebesar 0,22 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,23 persen; kelompok transportasi sebesar 1,78 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,23 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,90 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan deflasi 0,08 persen. Kelompok yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi selama April 2022 adalah minyak goreng, angkutan udara, bensin, daging ayam ras, upah asisten rumah tangga, anggur, dan pir. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-April 2022) sebesar 1,99 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 3,63 persen.

.....
<https://wartaekonomi.co.id> (diunduh 26 Mei 2022)

Pada bulan April 2022, Provinsi **Bali** secara bulanan mengalami inflasi 1,00% (mtm), lebih tinggi dibandingkan 0,91% (mtm) pada bulan sebelumnya kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Secara tahunan, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 3,05% (yoy), meningkat dibandingkan 2,41% (yoy) pada bulan sebelumnya, namun inflasi ini masih lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 3,47% (yoy). Kelompok barang *administered price* mencatat inflasi sebesar 2,43% (mtm), terutama disebabkan oleh peningkatan tarif angkutan udara dan tarif angkutan kota yang disebabkan oleh kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Khusus angkutan udara, tekanan kenaikan harga juga disebabkan oleh pelonggaran kenaikan *fuel surcharge* dari Pemerintah sebesar 10% untuk mengkompensasi kenaikan harga avtur. Komoditas bensin yang terdiri dari jenis premium, pertalite, dan pertamax, juga turut menyumbang inflasi *administered price* akibat kenaikan harga pertamax Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 2,37% (mtm), didorong oleh naiknya harga komoditas minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, tempe, dan tomat. Kenaikan harga minyak goreng terutama disebabkan oleh tren kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) global dan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam lebih disebabkan kenaikan permintaan selama bulan puasa dan menjelang perayaan HBKN Idul Fitri. Sementara laju inflasi *volatile food* tertahan oleh penurunan harga cabai rawit sejalan dengan peningkatan pasokan karena telah memasuki panen raya, terutama pada wilayah Bangli, Tabanan, dan Karangasem. Kelompok *core inflation* mencatatkan inflasi sebesar 0,32% (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi inti adalah sabun detergen bubuk/cair, sabun mandi, sabun cuci cair/cuci piring, kue kering berminyak, dan mobil. Peningkatan harga beragam jenis sabun sejalan dengan meningkatnya harga CPO yang menjadi bahan baku utama pembuatan sabun. Naiknya harga kue kering sejalan dengan kenaikan permintaan untuk perayaan HBKN Idul Fitri. Kenaikan harga mobil pada April 2022 disebabkan oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dan pengurangan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari 100% menjadi 66,66% per 1 April 2022.

.....
<https://www.redaksi9.com> (diunduh 28 Mei 2022)

Editorial

Pengendalian Inflasi dalam Kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pada triwulan 1 tahun 2022, BPS melaporkan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif membaik di angka 5,01 persen didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi masyarakat. Indikator inflasi IHK Mei 2022 menunjukkan indikator relatif stabil sebesar 3,55 persen (yoy) dan inflasi inti sebesar 2,58 persen (yoy). Hal tersebut didukung juga dengan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya permintaan domestik.

Namun menurut catatan IMF, dampak dari kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina berpotensi mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi global termasuk di Indonesia pada triwulan-triwulan berikutnya, dari 5,6 persen menjadi 5,4 persen. Kenaikan harga komoditas bahan pangan dan energi global diproyeksikan berkontribusi terhadap inflasi dari 3,8 persen menjadi 4,6 persen dikarenakan terhambatnya rantai pasok global (tepung, gandum, suplai gas, dan embargo minyak), seiring dengan arah kebijakan sanksi terhadap Rusia.



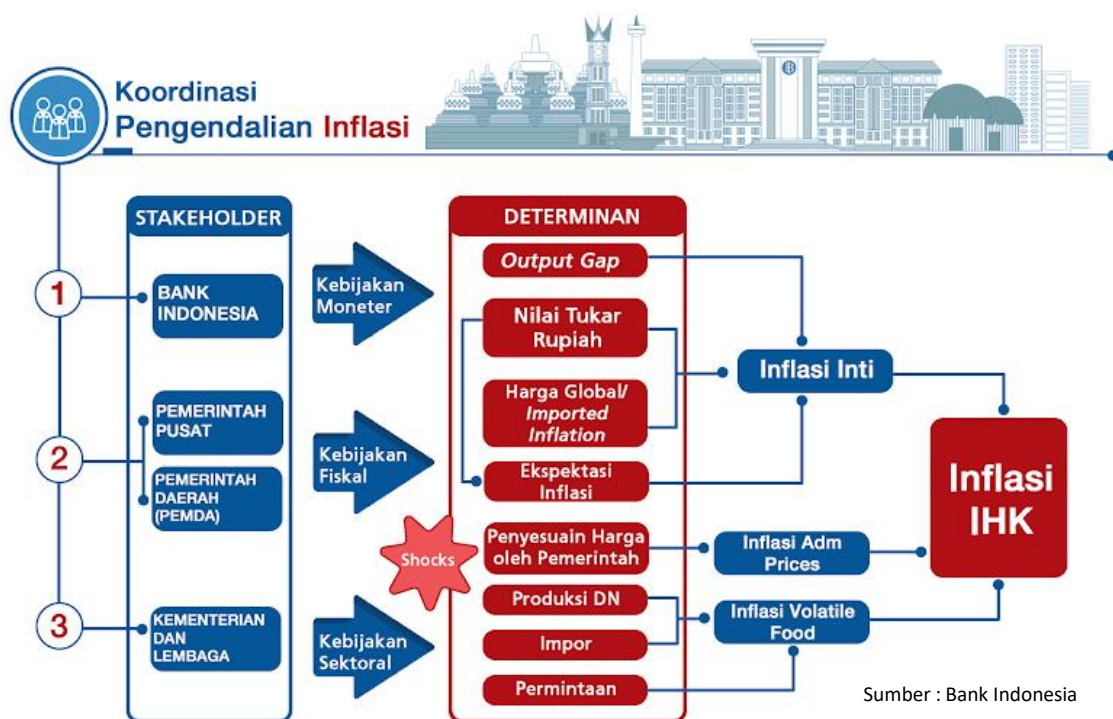
The Economist

Komoditas lain yang terdampak secara global yaitu harga CPO yang melonjak hingga 40% di bulan Februari 2022. Kebijakan peralihan penggunaan bahan bakar menjadi biodiesel negara-negara Uni Eropa dan di India menimbulkan kekhawatiran negara-negara tersebut mengimpor secara berlebihan bahan dasar biofuel yaitu CPO. Hal tersebut sempat mengakibatkan inflasi karena kelangkaan pasokan CPO untuk minyak goreng domestik.

Inflasi seperti pada bahan pangan dan energi di tingkat nasional dan regional menimbulkan lonjakan harga-harga barang dan jasa, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat (di tingkat mikro) dan stabilitas ekonomi (di tingkat makro) yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya inflasi baik dari faktor tekanan internal (misalnya kesenjangan antara sisi permintaan dan penawaran), eksternal (misalnya masalah rantai pasok global), dan ekspektasi pelaku pasar (misalnya spekulasi pada instrumen keuangan).

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) telah menerapkan kerangka kerja Flexible Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai sasaran inflasi tertentu dengan menggunakan suku bunga kebijakan dan suku bunga pasar uang antar bank sebagai sinyal kebijakan. Tidak hanya terbatas pada instrumen suku bunga, hal yang lebih mendasar adalah pada aspek tata kelola sistem keuangan yang mencakup integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial perbankan, kebijakan nilai tukar dan arus modal, strategi komunikasi kebijakan dan koordinasi BI dengan Pemerintah.

Editorial



Terkait kebijakan fiskal, potensi inflasi merupakan *fiscal risk exposure* yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah pusat dan daerah. Peran fiskal berupa kebijakan alokasi dan redistribusi dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan tarif pajak, belanja subsidi dan penyediaan bantalan berupa bantuan sosial.

Selain tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan yang dikelola oleh kebijakan moneter, kebijakan penawaran dari sisi fiskal yang terkait sektoral juga menjadi penting untuk diharmonisasikan. Kebijakan yang mengafirmasi penguatan industri dalam negeri, konektivitas distribusi antar wilayah, penyesuaian harga eceran tertinggi, dan penetapan kuota atau tarif impor merupakan bentuk koordinasi kebijakan fiskal secara sektoral.

Koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral terkait pengendalian inflasi antara pusat dan daerah memiliki

peran yang penting. Hal tersebut telah diperkuat dengan diterbitkannya Keppres No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Ruang lingkup kerja dari Keppres tersebut meliputi mekanisme koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan secara regional berupa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota.

Pada tingkat regional, koordinasi pengendalian inflasi akan diperkuat dengan kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Koordinasi TPID akan lebih efektif apabila didukung dengan kerangka pengendalian inflasi dalam kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di tingkat Regional. Sebagai pendetilan dari sinergi kebijakan KEM-PPKF pusat, KEM-PPKF di tingkat intra maupun inter regional merupakan referensi bagi daerah untuk mentransmisikan kontribusi kebijakan fiskal daerah terhadap indikator sosial ekonomi di tingkat nasional.

Editorial

Mengacu pada KEM-PPKF, dokumen perencanaan daerah dan APBD sebagai dokumen social contract antara kepala daerah dengan masyarakat, menerjemahkan kerangka kerja pencapaian indikator sosial ekonomi ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dilekatkan pada indikator makro dan target pembangunan. Indikator makro tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar petani. Sedangkan target pembangunan meliputi tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan menggabungkan kerangka ITF dan HKPD, tekanan inflasi yang berasal dari berbagai faktor ekonomi yang kompleks, dapat diuraikan dalam suatu strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif. Tekanan inflasi internal yang bersumber dari kesenjangan antara penawaran dan permintaan barang/jasa dapat diturunkan dengan kebijakan fiskal daerah secara sektoral. Dalam jangka pendek, dari sisi penawaran, Pemda dapat membelanjakan APBD secara ekspansif untuk program-program yang mendorong aktivitas investasi pada sektor-sektor unggulan, menyediakan infrastruktur ekonomi, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk menopang dampak inflasi dalam jangka menengah-panjang, dibutuhkan ruang fiskal daerah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan investasi teknologi.

Dalam menghadapi tekanan inflasi eksternal yang bersifat global, seperti kenaikan harga komoditas energi, volatilitas harga bahan pangan, dan dampak perubahan iklim, dibutuhkan strategi sinergi kebijakan secara nasional dan bersifat struktural. Kebutuhan energi global yang semakin meningkat, mendorong kebijakan

insentif bagi sektor energi alternatif terbarukan. Pada UU HKPD, misalnya, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (EBT) dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bahkan kendaraan ramah lingkungan juga dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Untuk isu pada kondisi geografis di daerah diperlukan suatu solusi penyediaan sarana distribusi logistik yang membantu integrasi ekonomi antar wilayah. Pemda berperan untuk menekan disparitas harga komoditas melalui kebijakan distribusi bahan pokok masyarakat. Pemda juga diharapkan dapat membantu mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) untuk menjaga stabilitas harga.

Terhadap adanya potensi kerentanan di sektor pangan, dibutuhkan suatu kebijakan ketahanan pangan yang mengutamakan produksi dalam negeri. Pemda menyiapkan cetak biru penataan ruang bahkan melibatkan entitas pedesaan yang mendukung ketersediaan sumber-sumber pangan seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan dalam rangka kemandirian pangan dan mendorong stabilitas harga.

Melalui kerangka HKPD, kebijakan pengelolaan transfer ke daerah didorong berbasiskan kinerja yang sejalan dengan dokumen perencanaan penganggaran yang ditetapkan sebelumnya. Daerah-daerah yang berkinerja baik dalam pemenuhan target pembangunan akan mendapatkan insentif lebih baik dibanding daerah yang mengabaikan target tersebut. Program stabilisasi ekonomi termasuk pengendalian inflasi daerah yang diturunkan ke dalam rencana aksi untuk mengintervensi faktor penyebabnya merupakan komitmen pelayanan publik yang melekat pada "social contract". Kunci dari kesuksesan program pengendalian inflasi ini adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif kepada masyarakat.

Editorial

Referensi

Purwono, R., Yasin, M. Z., & Mubin, M. K. (2020). Explaining regional inflation programmes in Indonesia: Does inflation rate converge?. *Economic Change and Restructuring*, 53(4), 571-590.

Tujuan Kebijakan Moneter. (2022). <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx> . diakses Juni 2022.

Inflasi Mei 2022 Tetap Terkendali. (2022) https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2414322.aspx . diakses Juni 2022

BKF Tinjau Efek Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Inflasi di Indonesia. (2022). <https://nasional.kontan.co.id/news/bkf-tinjau-efek-perang-rusia-dan-ukraina-terhadap-inflasi-di-indonesia>. diakses Juni 2022.

Does High Inflation Matter. (2022) <https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/04/23/does-high-inflation-matter>. diakses Juni 2022.

War and sanctions have caused commodities chaos. (2022). <https://www.economist.com/leaders/2022/03/12/war-and-sanctions-have-caused-commodities-chaos>. diakses Juni 2022.

Kajian Pilihan

Hubungan Infrastruktur Daerah dengan Indeks Kemahalan Daerah

A. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi nasional maupun regional. Perubahan perilaku inflasi disebabkan oleh beberapa perubahan/*shock* yang berkaitan dengan perubahan permintaan barang/jasa ataupun perubahan perencanaan penganggaran APBD seperti realokasi/*refocusing* akibat terjadinya kejadian luar biasa seperti pandemi covid-19. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu perekonomian Indonesia, inflasi diatasi dengan kebijakan pemerintah yang sesuai seperti pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendorong penurunan inflasi tahunan dari 3,6% pada 2017 menjadi 3,13% pada 2018 (katadata 2019). Dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat memperlancar arus barang hingga ke pusat produksi sehingga menekan biaya logistik.

Menurut Ahmad Erani Yustika (2020) menyatakan bahwa infrastruktur lain yang berpengaruh terhadap rendahnya inflasi adalah proyek jalan dan irigasi yang ada di desa dan dibiayai dari dana desa. Apakah terdapat hubungan antara inflasi dengan infrastruktur khususnya di daerah? Hal ini perlu diperhatikan bahwa inflasi yang berhubungan dengan infrastruktur di daerah adalah inflasi daerah yang membentuk inflasi nasional. Walaupun inflasi nasional terbentuk dari inflasi-inflasi daerah, Wimanda (2006) mengatakan bahwa pola pergerakan antara inflasi-inflasi daerah dengan inflasi nasional seringkali berbeda. Inflasi daerah dalam perspektif pemerintah daerah dan digunakan dalam tulisan ini

adalah inflasi yang disebabkan oleh pembangunan di daerah dengan komponen IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) sebagai pembentuknya, yaitu indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Berdasarkan BPS (2022), sumber data IKK diperoleh dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.

Berdasarkan inflasi daerah yang terbentuk dari IKK, tulisan ini bertujuan menganalisis apakah ada keeratan hubungan antara inflasi daerah Indonesia dengan indeks infrastruktur yang merupakan kumpulan dari komponen variabel infrastruktur pelayanan publik yang telah dibangun. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan mengenai proyek pembangunan pelayanan publik seperti apa yang memberikan dampak inflasi yang wajar atau tidak terlalu mengganggu perekonomian daerah sehingga kebijakan TKDD yang diambil oleh pemerintah pusat dapat menyesuaikan.

B. Pembahasan

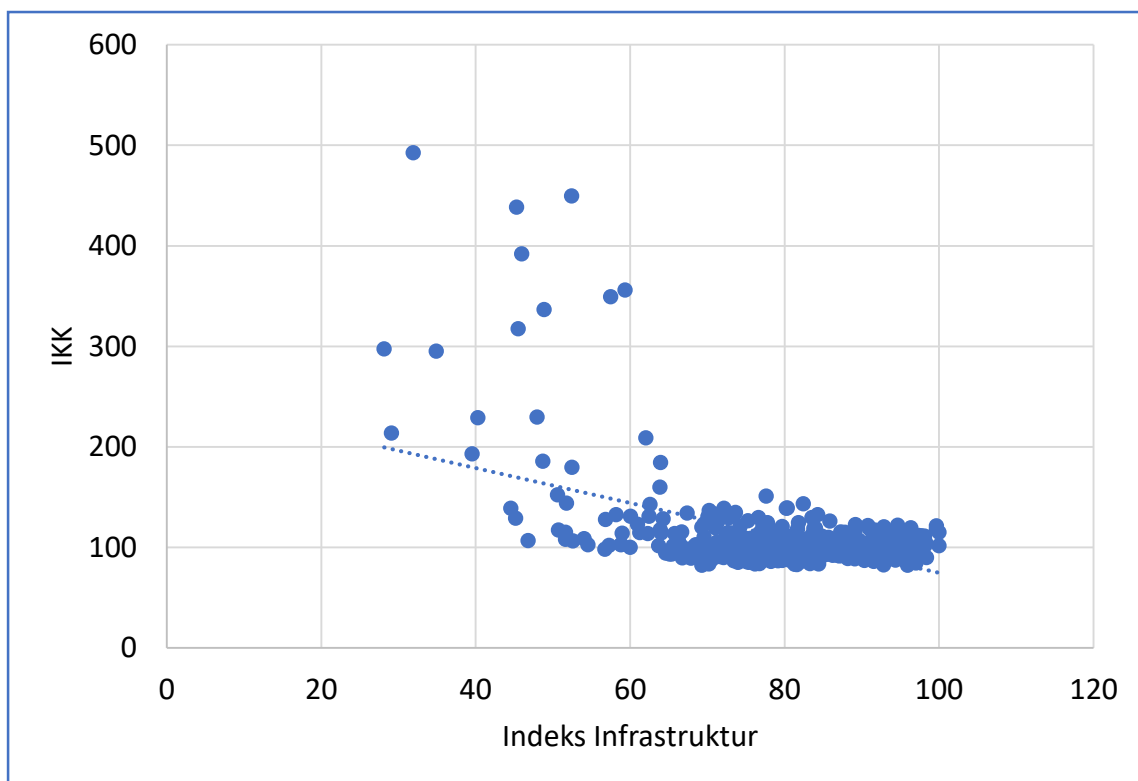
Indeks Kemahalan konstruksi menurut BPS (2010) dikategorikan sebagai indeks spasial yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga di suatu wilayah dengan wilayah lain dengan periode tertentu. Dasar perhitungan IKK juga dibagi menjadi 3 kelompok konstruksi, yaitu bangunan/bukan tempat tinggal, pekerjaan umum untuk jalan/jembatan/pelabuhan, dan bangunan lainnya. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah,

Kajian Pilihan

semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Sedangkan indeks infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan insfatruktur dan persebaran pembangunan antara daerah di seluruh wilayah Indonesia (DJPk 2020). Melalui metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang mentransformasi variabel-variabel infrastruktur seperti air minum, sanitasi, jalan, listrik, dan telekomunikasi serta mereduksi variabel-variabel tersebut menjadi satu variabel baru dengan dimensi yang kecil.

Hubungan antara IKK sebagai analogi inflasi daerah dengan indeks infrastruktur ini merupakan implikasi dari teori strukturalis inflasi (Bank Indonesia 2015) di Eropa yang menyatakan bahwa struktural perekonomian negara yang dapat

diartikan sebagai kebijakan perencanaan keuangan pembangunan dapat mempengaruhi harga di suatu wilayah. Dampak perencanaan pembangunan di daerah ini akan terlihat pada inflasi campuran yaitu inflasi yang disebabkan oleh berubahnya permintaan dan penawaran konstruksi pembangunan. Hubungan IKK dan indeks infrastruktur ini akan mencerminkan bagaimana pembangunan output APBD berupa fasilitas pelayanan publik ini berdampak pada perubahan perilaku inflasi daerah. Kemudian dengan mengetahui hubungannya kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki inflasi rendah dan indeks infrastruktur tinggi atau sebaliknya. Daerah-daerah ini akan menjadi tolok ukur yang baik bagi program pembangunan pemerintah daerah sekaligus pemerintah dapat mengambil kebijakan TKDD yang tepat demi memajukan perekonomian daerah.



Kajian Pilihan

Dalam tulisan ini diidentifikasi empat kuadran dengan beberapa kriteria hubungan secara statistik antara IKK dengan Indeks Infrastruktur, yaitu;

a. Indeks infrastuktur tinggi dan IKK tinggi (kuadran I)

Jumlah daerah yang ada pada kuadran ini ada 42 daerah. Daerah yang masuk dalam kuadran ini sebagian besar ada di Pulau Jawa antara lain Kabupaten Bandung, Kota Depok Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Bekasi. Ada juga Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kota Batam dan Kota Ambon untuk diluar Pulau Jawa. IKK tinggi pada daerah yang infrastruktur baik ini di sebabkan faktor lain di luar infrastruktur. Daerah yang masuk dalam kategori ini memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik.

b. Indeks infrastruktur tinggi dan IKK rendah (kuadran II)

Jumlah daerah yang ada pada kuadran ini paling banyak yaitu ada 260 daerah. Daerah yang masuk dalam kuadran ini antara lain Kota Binjai, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Pematang Siantar, Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kota Kendari, Kota Bengkulu, Kota Palembang, dan Kota Palu. Secara umum daerah yang infrastruktur tinggi, kemahalan akan bahan-bahan kontruksi cenderung rendah. Kondisi ini yang diharapkan dan kondisi yang ideal bagi daerah untuk mempercepat pembangunan yang di dukung oleh akses distribusi yang baik dan biaya pembangunan rendah.

c. Indeks infrastruktur rendah, IKK tinggi, (kuadran III)

Jumlah daerah yang ada pada kuadran ini ada sebanyak 82 daerah. Daerah yang masuk dalam kuadran ini sebagian besar berada di wilayah timur antara lain Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Tolikara. Selain itu ada juga daerah yang letaknya pada perbatasan misalnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Infrastruktur rendah ini

menyebabkan biaya pembangunan tinggi atau high cost economy sehingga pelaksanaan pembangunan yang dananya baik dari APBD murni atau TKD perlu kebijakan-kebijakan afirmasi.

d. Indeks infrastruktur rendah, IKK rendah (kuadran IV)

Jumlah daerah yang ada pada kuadran ini ada 157 daerah. Daerah yang masuk dalam kategori ini ada Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Way Kanan. Daerah ini secara biaya tidak terlalu tinggi untuk pembangunan infrastruktur namun perlu di dorong untuk meningkatkan infrastruktur.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan yang dapat kita pembahasan diatas:

1. Daerah yang infrastruktur sudah baik cenderung IKK-nya rendah dan sebaliknya. Hal ini dapat kita lihat daerah yang masuk dalam kuadran II paling banyak.
2. Infrastruktur rendah yang ada di daerah bisa menyebabkan biaya pembangunan tinggi atau *high cost economy*.

Rekomendasi secara umum:

1. Pemerintah dapat melakukan pendekatan kebijakan yang berbeda pada tiap kelompok daerah sesuai dengan kondisi infrastruktur dan kemahalan kontruksinya.
2. Untuk daerah yang kondisi infrastrukturnya rendah dan kemahalan kontruksinya tinggi, Pemerintah fokus untuk memperbaiki infrastruktur sehingga harga kontruksi turun. Dengan demikian Pemerintah Daerah tidak menanggung beban pembangunan yang tinggi.
3. Untuk daerah yang kondisi infrastrukturnya rendah dan kemahalan kontruksinya juga rendah, Pemerintah perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur.

Edisi XXVIII

LPEFD

Laporan Perkembangan
Ekonomi dan Fiskal Daerah



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Astera Primanto Bhakti • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimboro Dahrojatun • Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprpti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafuruddin • Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa
Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati
